JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 24/10/2026; Revised: 07/11/2026;
Accepted: 08/11/2026; Published: 09/11/2026

Tata Kelola Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis Kemitraan Ekosistem di Pulang Pisau

Muhammad Irvan Yazid Azhar Pasaribu[1)], Bayu Suratmoko[2)], Jaemi Wahyudi[3)]

Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Indonesia

irvanyazid10@gmail.com[1)], bayusuratmoko60@gmail.com[2)],
Jaemi.wahyudi@gmail.com[3)]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan ulang tata kelola pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pendekatan kemitraan ekosistem dan inklusi keuangan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Di tengah stagnasi pertumbuhan ekonomi daerah pada angka 4-5%, intervensi pemerintah daerah yang selama ini bertumpu pada perluasan akses kredit konvensional terbukti belum efektif. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam terhadap elemen pembuat kebijakan, lembaga intermediasi perbankan, dan pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga kesenjangan utama: pertama, hambatan birokrasi di tingkat kecamatan yang belum terintegrasi penuh dengan sistem perizinan berbasis risiko; kedua, keengganan perbankan daerah dalam menyalurkan kredit akibat tingginya rasio kredit bermasalah pada program sebelumnya; dan ketiga, beban arus kas UMKM akibat sistem pembayaran mundur dari institusi daerah serta beban biaya transaksi digital. Hasil dari penelitian ini merekomendasikan transisi kebijakan ekonomi publik dari paradigma ekstensifikasi utang menuju skema kemitraan strategis (*inti-plasma*) yang menempatkan institusi pemerintah dan perbankan sebagai pembeli siaga (*off-taker*) dalam ekosistem bisnis lokal.

Kata kunci: Administrasi Publik, Ekonomi Kreatif, Inklusi Keuangan, Kebijakan Ekonomi, Kemitraan Ekosistem

Abstract

This study aims to reformulate the governance of Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) empowerment through an ecosystem partnership and financial inclusion approach in Pulang Pisau Regency, Central Kalimantan. Amidst stagnant regional economic growth hovering between 4% and 5%, local government interventions, which have traditionally relied on expanding access to conventional credit, have proven ineffective. Employing a descriptive qualitative research design with a case study approach, data were collected through in-depth interviews with policymakers, banking intermediaries, and MSME operators. The findings reveal three primary gaps: first, bureaucratic hurdles at the sub-district level that remain poorly integrated with risk-based licensing systems; second, the reluctance of local banks to extend credit, stemming from high non-performing loan ratios in previous programs; and third, the strain on MSME cash flow caused by delayed payment systems from local institutions, compounded by the costs associated with digital transactions. The study concludes by recommending a shift in public economic policy, moving away from a paradigm centered on debt-based expansion toward a strategic partnership model (a "nucleus-plasma" or core-satellite structure). In this framework, government and banking institutions would act as "off-takers" (guaranteed buyers) within the local business ecosystem.

Key words: *Public Administration, Creative Economy, Financial Inclusion, Economic Policy, Ecosystem Partnerships*

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 24/10/2026; Revised: 07/11/2026;
Accepted: 08/11/2026; Published: 09/11/2026

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi daerah sangat bergantung pada daya tahan sektor usaha skala mikro. Di Kabupaten Pulang Pisau, pencapaian pertumbuhan ekonomi makro yang cenderung stagnan pada angka 4-5 persen dalam tiga tahun terakhir menuntut adanya evaluasi komprehensif terhadap kebijakan intervensi ekonomi publik, khususnya pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah daerah sejatinya telah mengidentifikasi bahwa keberadaan ribuan pelaku UMKM, baik di sektor budidaya pertanian maupun ekonomi kreatif merupakan motor penggerak utama resiliensi ekonomi akar rumput (Tambunan, 2019). Namun, tata kelola pemberdayaan yang dijalankan masih dihadapkan pada fragmentasi birokrasi perizinan dan belum optimalnya inklusi keuangan yang adaptif terhadap karakteristik pelaku usaha lokal (Smith & Jones, 2022). Secara administratif, pelaku usaha mikro di tingkat desa dan kecamatan sering kali hanya memiliki legalitas berupa surat keterangan yang tidak sepenuhnya terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), sehingga membatasi kapasitas mereka untuk dinilai layak mengakses fasilitas pembiayaan perbankan.

Dalam kajian administrasi publik kontemporer, penanganan isu multidimensional seperti pemberdayaan UMKM tidak lagi relevan menggunakan pendekatan struktural yang kaku. Ansell dan Gash (2018) serta Nugroho (2017) menekankan pentingnya *collaborative governance* atau tata kelola kolaboratif sebagai instrumen inovasi kebijakan publik (Emerson & Nabatchi, 2015). Paradigma ini mensyaratkan pergeseran peran pemerintah dari sekadar "regulator administratif" menjadi "orkestrator" yang menjembatani konsensus antara sektor publik, lembaga privat (perbankan), dan aktor masyarakat (pelaku usaha). Menggunakan tata kelola kolaboratif sebagai pisau analisis, efektivitas suatu intervensi ekonomi tidak diukur dari seberapa banyak program permodalan yang disalurkan, melainkan dari sejauh mana integrasi ekosistem terbangun untuk menekan hambatan birokrasi dan memitigasi risiko pasar secara kolektif.

Penelitian-penelitian terdahulu terkait tata kelola UMKM umumnya berfokus pada pentingnya injeksi modal dan digitalisasi sebagai solusi tunggal dalam akselerasi bisnis mikro (Budiarto et al., 2021; Williams, 2023). Literatur arus utama kerap mengasumsikan bahwa kemudahan akses kredit dan adopsi instrumen digital, seperti *Quick Response Code* Indonesian Standard (QRIS), akan secara otomatis memicu kinerja UMKM. Namun, state of the art dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan transaksional tersebut memiliki kelemahan mendasar jika diterapkan pada daerah dengan resiliensi ekonomi yang rapuh. Realitas implementasi kebijakan di Kabupaten Pulang Pisau memperlihatkan kesenjangan (*gap analysis*) yang signifikan. Model "kemitraan ekosistem" yang ditawarkan dalam penelitian ini hadir sebagai resolusi yang lebih unggul dibandingkan literatur sebelumnya karena mengatasi akar persoalan secara hulu ke hilir. Di satu sisi, bank daerah memiliki trauma struktural terhadap tingginya angka kredit macet dari program sektor primer sebelumnya sehingga menahan penyaluran kredit produktif. Di sisi lain, UMKM yang mapan justru mengalami pendarahan arus kas (*cash flow*) akibat sistem pengadaan institusi pemerintah yang menerapkan pembayaran tunda, serta terbebani oleh potongan biaya administrasi transaksi digital yang menggerus margin tipis mereka.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 24/10/2026; Revised: 07/11/2026;
Accepted: 08/11/2026; Published: 09/11/2026

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada upaya mendekonstruksi paradigma pemberdayaan UMKM dari yang sebelumnya berorientasi pada "ekstensifikasi kredit" menjadi tata kelola "kemitraan ekosistem strategis". Penelitian ini tidak sekadar mengevaluasi hambatan birokrasi, tetapi menawarkan model resolusi berbasis kolaborasi, di mana pemerintah daerah dan perbankan didorong untuk bertindak bukan hanya sebagai fasilitator modal, melainkan sebagai pembeli siaga (*off-taker*) dalam rantai pasok UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika tata kelola dan hambatan inklusi keuangan UMKM di Kabupaten Pulang Pisau, serta merumuskan skema kemitraan ekosistem yang tepat untuk memecahkan stagnasi siklus ekonomi di tingkat mikro.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk membedah dinamika tata kelola pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pulang Pisau (Creswell & Poth, 2018). Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk menggali kedalaman informasi terkait hambatan birokrasi dan akses inklusi keuangan yang tidak dapat diukur semata-mata dengan pendekatan numerik. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling yang merepresentasikan elemen kolaborasi lintas sektor, meliputi unsur perumus dan pelaksana kebijakan (Kepala Bapperida dan aparatur Kecamatan Kahayan Hilir), lembaga intermediasi keuangan (Pimpinan Cabang/PIC Bank Kalteng), serta pelaku usaha akar rumput dari sektor ekonomi kreatif dan budidaya. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pedoman semi-terstruktur guna memetakan kesenjangan antara kebijakan publik dan realitas siklus usaha. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik reduksi data tematik, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan dan validitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan cara melakukan uji silang (*cross-check*) informasi secara berlapis, yakni membandingkan klaim kebijakan makro dari Bapperida dan prosedur administratif Kecamatan dengan argumentasi mitigasi risiko dari pihak perbankan, lalu mencocokkannya secara langsung dengan realitas empiris serta beban operasional yang dialami oleh pelaku UMKM di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Birokrasi dan Fragmentasi Layanan Legalitas Usaha

Tata kelola pemberdayaan UMKM dalam kerangka administrasi publik menuntut adanya sistem pelayanan birokrasi yang terintegrasi. Secara makro, perencanaan pembangunan Kabupaten Pulang Pisau memposisikan UMKM berskala mikro sebagai instrumen penyelamat ekonomi daerah di tengah laju pertumbuhan yang lambat. Kepala Bapperida Kabupaten Pulang Pisau menegaskan urgensi relaksasi kebijakan tersebut, *"Pertumbuhan ekonomi kita masih di rata-rata sekitar 4 sampai 5 persen. Ada kebijakan yang bisa menstimulus perekonomian masyarakat melalui bantuan permodalan yang syarat dan ketentuannya tidak merepotkan. Minimal kita bisa menyelamatkan bergeraknya roda perekonomian di level paling bawah." (lihat Gambar 1).*

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 24/10/2026; Revised: 07/11/2026;
Accepted: 08/11/2026; Published: 09/11/2026

Gambar 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Pulang Pisau



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

Namun, niat baik (*goodwill*) dari perencanaan makro tersebut masih memerlukan sinkronisasi dengan realitas pelayanan di tingkat operasional. Sebagai tantangan struktural, birokrasi di tingkat bawah masih dalam masa transisi penyesuaian kewenangan untuk memfasilitasi legalitas yang dibutuhkan untuk pemenuhan kelayakan akses perbankan. Kewenangan kecamatan saat ini telah bergeser; perizinan berusaha terintegrasi (*Online Single Submission*/OSS) berada di tingkat kabupaten (DPMPTSP), sedangkan kecamatan hanya memiliki kewenangan administratif dasar (Sari & Rahmadi, 2021).

Hal ini dikonfirmasi secara langsung oleh aparatur Bagian Ekonomi Kecamatan Kahayan Hilir yang menyatakan *"Kalau sifatnya UMKM yang kecil biasanya di Kecamatan Kahayan Hilir ini, tidak lagi memberikan perizinan, hanya surat keterangan. Itu pun kalau diminta untuk melengkapi berkas, misalnya minta kredit di bank atau subsidi listrik. Tapi kalau yang sifatnya besar itu berada di DPMPTSP. Sifatnya kita pelayanan dasar saja di kecamatan kecil ini."* (lihat Gambar 2)

Gambar 2. Triangulasi Pengumpulan Data Lapangan di Kecamatan Kahayan Hilir, Pulang Pisau

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 24/10/2026; Revised: 07/11/2026;
Accepted: 08/11/2026; Published: 09/11/2026



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

Kondisi tersebut menciptakan hambatan administratif awal. UMKM di pedesaan sering kali kesulitan menjangkau akses pelayanan ke tingkat kabupaten atau tidak memiliki literasi digital yang memadai untuk mendaftar NIB secara mandiri. Akibatnya, status mereka tertahan pada legalitas informal (surat keterangan) yang secara perbankan dinilai belum memenuhi prinsip kelayakan kredit (*bankable*).

Hambatan Inklusi Keuangan: Mitigasi Risiko Bank vs. Realitas Arus Kas UMKM

Kendala pemenuhan legalitas formal tersebut turut memengaruhi belum optimalnya inklusi keuangan sektoral. Dari sisi lembaga pembiayaan, Bank Kalteng sebagai representasi perbankan daerah menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudence*) yang sangat ketat dalam menyalurkan kredit produktif. Ketatnya mitigasi risiko ini dilatarbelakangi oleh rekam jejak penyelesaian kredit bermasalah pada masa lalu, khususnya dari program sektor pertanian konvensional, serta masalah moral hazard di masyarakat.

Pihak representasi pembiayaan Bank Kalteng Pulang Pisau, Ibu Tri Haryawati mengungkap trauma struktural tersebut, *"Dulu kita ada program Food Estate, kebanyakan pembayaran kreditnya gagal, karena mereka kan pola panen per 6 bulan. Begitu panen, mereka lebih mementingkan biaya lain dulu, yang ke bank nanti dulu, akhirnya tidak tertutup. Kadang pola pikir masyarakat tentang kredit KUR juga masih mengira itu adalah bantuan hibah dari pemerintah, jadi tidak mau bayar."* (lihat Gambar 3).

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 24/10/2026; Revised: 07/11/2026;
Accepted: 08/11/2026; Published: 09/11/2026

Gambar 3. Representasi Pembiayaan Bank Kalteng



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

Di sisi lain, UMKM yang telah memiliki skalabilitas dan legalitas memadai pun ternyata menghadapi hambatan arus kas (*cash flow*) yang justru diakibatkan oleh skema pengadaan institusi pemerintah daerah. Pelaku usaha terjebak dalam disonansi siklus keuangan. Mereka diwajibkan menyetorkan pembayaran tunai secara langsung kepada pemasok di akar rumput, namun sistem pembayaran dari mitra institusi daerah menggunakan mekanisme klaim bertempo. Bapak Bahriannor selaku pemasok bahan pangan ke RSUD Pulang Pisau menjelaskan*, "Kalau kita ke supplier sayur dan ikan itu cash, tapi ke mitra (rumah sakit) itu biasanya harus kita klaim dulu pembayarannya, mereka ngutang. Sementara kita harus cash mutar untuk beli bahan. Itu saja kendalanya untuk memajukan perusahaan."* Hambatan likuiditas ini diperparah oleh resistensi UMKM ekonomi kreatif terhadap instrumen digitalisasi keuangan. Penggunaan instrumen non-tunai seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) ternyata memunculkan beban biaya administrasi (Merchant Discount Rate/MDR) yang menggerus margin keuntungan (Riyanto & Pambudi, 2020). Pengelola UMKM Warung Apresiasi/Wapres, Ibu Nurhelsa secara kritis menyoroti hal ini *"Kenapa UMKM kadang tidak mau pakai QRIS, soalnya ada adminnya. Semakin banyak transaksi di hari itu, makin banyak pemotongannya. Orang jadi malas karena admin, apalagi margin UMKM kecil. Ini harusnya jadi masukan buat bank."*

Fenomena disonansi siklus keuangan dan resistensi adopsi digital ini, jika ditelaah melalui perspektif *New Public Management* (NPM) dan teori implementasi kebijakan (Edward III), menunjukkan adanya kegagalan sinkronisasi antara tujuan makro dan instrumen teknis kebijakan. Sistem klaim bertempo dari institusi pemerintah pada dasarnya menciptakan administrative burden (beban administratif) yang secara langsung menggerus likuiditas UMKM, bertolak belakang dengan semangat regulasi pemberdayaan itu sendiri. Alih-alih bertindak sebagai katalisator pertumbuhan, prosedur birokrasi pengadaan barang dan jasa di

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 24/10/2026; Revised: 07/11/2026;
Accepted: 08/11/2026; Published: 09/11/2026

tingkat daerah secara tidak langsung memaksa UMKM menanggung biaya kapital (*cost of capital*) akibat kelambanan pembayaran negara. Hal ini mengonfirmasi postulat implementasi kebijakan publik bahwa tanpa adanya koherensi instrumen, yakni keselarasan antara niat memberdayakan dengan kemudahan prosedur teknis serta struktur insentif yang adil—tata kelola inklusi keuangan tidak akan pernah terwujud secara optimal di tingkat akar rumput.

Transisi Tata Kelola: Menuju Kemitraan Ekosistem Strategis

Berdasarkan kesenjangan antara regulasi birokrasi, kehati-hatian perbankan, dan beban likuiditas riil UMKM, paradigma pemberdayaan tidak dapat lagi hanya bertumpu pada "injeksi dana" atau ekstensifikasi utang. Intervensi kebijakan ekonomi publik daerah harus diarahkan pada penciptaan "Kemitraan Ekosistem Strategis".

Pertama, pemerintah daerah perlu memfasilitasi skema inti-plasma pada sektor budidaya dan peternakan. Dalam skema ini, perusahaan berskala besar bertindak sebagai bapak angkat (*off-taker*) yang menyediakan sarana produksi, sedangkan UMKM bertindak sebagai pengelola. Skema kolaboratif ini terbukti paling aman untuk membuka akses permodalan, sebagaimana ditegaskan oleh Bank Kalteng "*Kalau peternakan ayam pribadi itu agak kesulitan kita berikan (kredit). Tapi sekarang peternakan ayam itu sudah kerjasama sama perusahaan, jadi dari sisi kita pemberian kredit pun sudah aman. Bibit, pakan, transportasi ditanggung perusahaan. Segagal-gagalnya panen, nasabah masih mendapatkan uang, tidak langsung nol rupiah*."

Kedua, tata kelola ekonomi kreatif menuntut pergeseran posisi instansi pemerintah (OPD) dan perbankan daerah dari sekadar "pemberi modal" menjadi konsumen utama (captive market). UMKM menolak skema kredit yang membebani, dan lebih memilih kemitraan penyerapan produk. Hal ini ditegaskan oleh pelaku usaha UMKM *"Kalau dikasih pinjaman itu bentuknya jadi beban buat kita. Harusnya bentuk kerjasamanya saling memberikan manfaat. Kita punya produk, bank atau pemerintah yang beli atau pajang untuk kegiatan (event) mereka. Jadi pembinaannya berkelanjutan, bukan sekadar tentang (ngasih) modal."*

Dengan menempatkan OPD dan perbankan sebagai pembeli tetap (*off-taker*) produk jasa UMKM dalam setiap pengadaan daerah, perputaran likuiditas akan tetap mengalir di wilayah Pulang Pisau. Pendekatan ekosistem kolaboratif inilah yang akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi makro melampaui stagnasi tanpa harus menjerat pelaku UMKM dengan risiko kredit bermasalah.

SIMPULAN

Tata kelola pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pulang Pisau saat ini menghadapi stagnasi yang berakar pada fragmentasi birokrasi perizinan dan kesenjangan inklusi keuangan. Niat baik pemerintah daerah untuk menstimulus resiliensi ekonomi mikro masih memerlukan penyelarasan dengan kapasitas kewenangan di tingkat kecamatan, kehati-hatian perbankan akibat rekam jejak kredit bermasalah, serta beban arus kas UMKM yang dipicu oleh mekanisme pembayaran tunda dari institusi daerah dan biaya transaksi digital. Sebagai resolusi kebijakan ekonomi publik, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan UMKM harus segera bertransformasi dari paradigma "ekstensifikasi kredit/utang" menuju model "kemitraan ekosistem strategis". Transisi ini mensyaratkan

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 24/10/2026; Revised: 07/11/2026;
Accepted: 08/11/2026; Published: 09/11/2026

penerapan skema inti-plasma di sektor budidaya untuk memitigasi risiko bank, sekaligus mewajibkan institusi pemerintah daerah dan perbankan untuk mereposisi perannya menjadi pembeli siaga (*captive market)* yang menjamin kepastian pasar dan kelancaran likuiditas bagi UMKM ekonomi kreatif.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merumuskan rekomendasi kebijakan (policy recommendation) yang terstruktur bagi para pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah (Kabupaten Pulang Pisau)
   Disarankan untuk segera menyusun regulasi teknis, seperti Peraturan Bupati (Perbup), yang mengikat kewajiban skema kemitraan ekosistem lintas OPD. Regulasi ini harus memuat klausul prioritas penyerapan produk lokal UMKM dalam setiap pengadaan barang/jasa instansi, serta mereformasi mekanisme pembayaran agar tidak membebani likuiditas (*cash flow*) pelaku usaha mikro.
2. Bagi Lembaga Perbankan Daerah
   Diharapkan dapat mereposisi perannya dari sekadar penyalur kredit menjadi bagian dari ekosistem pembeli siaga (*captive market*). Selain itu, perbankan perlu mengevaluasi dan memberikan insentif terkait pemotongan biaya administrasi transaksi digital (MDR pada QRIS) agar adopsi inklusi keuangan tidak menggerus margin UMKM.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya
4. Disarankan untuk mengukur efektivitas penerapan tata kelola kemitraan ekosistem ini melalui pendekatan kuantitatif, atau mereplikasi studi kualitatif sejenis di wilayah kabupaten lain guna menyempurnakan grand design kebijakan ekonomi publik berskala provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16-32. https://doi.org/10.1093/jopart/mux030

Budiarto, A., Setiawan, R., & Wulandari, S. (2021). Transformasi digital dan inklusi keuangan UMKM di era pasca pandemi. *Jurnal Ekonomi Publik dan Tata Kelola*, 5(2), 112-125. https://doi.org/10.1016/j.jep.2021.05.002

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative Governance Regimes*. Georgetown University Press.

Haryanto, T., & Astuti, R. (2020). Evaluasi kebijakan pembiayaan perbankan daerah terhadap sektor usaha mikro dan menengah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(3), 210-225.

Indriani, M., & Firmansyah, A. (2019). Analisis merchant discount rate (MDR) pada QRIS dan dampaknya terhadap profitabilitas pedagang eceran. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 45-58.

Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi)*. Andi Offset.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 24/10/2026; Revised: 07/11/2026;
Accepted: 08/11/2026; Published: 09/11/2026

Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Elex Media Komputindo.

Pratama, A. B., & Rahayu, S. (2022). Kapasitas birokrasi tingkat kecamatan dalam fasilitasi layanan izin usaha mikro berbasis OSS. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 10(2), 134-148.

Riyanto, A., & Pambudi, S. (2020). Analisis kendala likuiditas dan adopsi pembayaran non-tunai pada UMKM. *Jurnal Keuangan Publik*, 11(2), 180-195.

Sari, A. P., & Rahmadi, T. (2021). Hambatan birokrasi dan legalitas usaha mikro di era desentralisasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45-56.

Smith, J. A., & Jones, M. (2022). Collaborative governance in micro-enterprise empowerment: A local government perspective. *Public Administration Review*, 82(4), 670-685. https://doi.org/10.1111/puar.13456

Tambunan, T. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9(1), 1-15. https://doi.org/10.1186/s10490-019-0090-y

Wibowo, A. P., & Setyawan, D. (2023). Skema kemitraan inti-plasma sebagai mitigasi risiko pembiayaan sektor budidaya. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Daerah*, 8(1), 77-92.

Williams, D. (2023). Beyond credit injection: Building resilient local startup ecosystems through public-private partnerships. *Journal of Economic Policy Reform*, 26(1), 88-105. https://doi.org/10.1080/13841289.2022.2091234

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.